

DAFTAR ISI

Catatan Redaksi	iii
Abstrak	vii
• <i>Post Truth</i> dalam Perseteruan Indonesia-Uni Eropa Mengenai Isu Kelapa Sawit <i>oleh: Aditya Dwindu Pratama</i>	95-112
• Tata Kelola Keamanan Siber dan Diplomasi Siber Indonesia di Bawah Kelembagaan Badan Siber dan Sandi Negara <i>oleh: Hidayat Chusnul Chotimah</i>	113-128
• <i>The Dynamics Beyond Counter Terrorism Measures in the Indo-Pacific</i> <i>oleh: Samti Wira Wibawati, Marina Ika Sari, Yuli Ari Sulistyani</i>	129-143
• Kedaulatan Partisipasi Pemilih dalam Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Umum Serentak 2019 <i>oleh: Joko Riskiyono</i>	145-165
• Kegagalan Gerakan Buruh dan Partai Buruh Pada Pemilu Era Reformasi <i>oleh: Dodi Faedlulloh</i>	167-182
• Peran Organisasi Masyarakat Sipil dalam Proses Perintisan Sistem Informasi Desa di Kalibening, Dukun, Magelang, Jawa Tengah <i>oleh: Anggalih Bayu Muh. Kamim</i>	183-203
Pedoman Penulisan	

CATATAN REDAKSI

Jurnal *Politica* Vol. 10 No. 2 November 2019 menyajikan enam artikel yang membahas topik-topik yang terkait isu-isu strategis Indonesia, baik di bidang politik dalam negeri maupun hubungan internasional, baik hasil kajian maupun penelitian.

Artikel pertama berjudul “*Post Truth* dalam Perseteruan Indonesia-Uni Eropa Mengenai Isu Kelapa Sawit” ditulis oleh Aditya Dwindia Pratama. Artikel ini membahas perseteruan antara Uni Eropa (UE) dan Indonesia terkait pemboikotan UE terhadap komoditas kelapa sawit Indonesia. Kelapa sawit dianggap tidak sesuai dengan komitmen lingkungan UE dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs) karena menimbulkan banyak kerusakan lingkungan. Indonesia menggugat diskriminasi UE terhadap kelapa sawit Indonesia di pasar Eropa ke *World Trade Centre* (WTO). Indonesia mempertanyakan komitmen UE terhadap SDGs tentang pemberantasan kemiskinan. Dengan pemikiran yang kritis untuk menganalisa kebenaran akan suatu isu, tulisan ini mempertanyakan kembali kebenaran dari pembelaan yang dilakukan UE dan Indonesia. Kebenaran dalam persaingan ekonomi di era *post truth* terlalu sering ditentukan oleh informasi yang paling masif diberitakan oleh media, oleh karena itu dalam tulisan ini penulis menggunakan pengamatan literasi, terutama mengamati berita-berita yang media distribusikan terkait isu tersebut. Penulis memberi pemahaman tentang *post truth theory*, *trade off theory*, dan *national theory* sehingga pembaca mampu menganalisa segala kepentingan dibalik kebijakan UE dan Indonesia. Bersikap kritis dengan menggali kenyataan dibalik sebuah kebenaran yang telah terkonstruksi oleh media yang mendistribusikan informasi adalah sebuah hal yang mutlak untuk dilakukan oleh setiap individu di era *post truth*.

Artikel kedua ditulis Hidayat Chusnul Chotimah dengan judul “Tata Kelola Keamanan Siber dan Diplomasi Siber Indonesia di Bawah Kelembagaan Badan Siber dan Sandi Negara”. Dunia maya merupakan salah satu aspek yang saat ini ikut diperhitungkan dalam keamanan nasional suatu negara, di samping ranah darat, laut, dan udara. Sebagai salah satu negara pengguna internet terbesar di dunia, telah menjadikan Indonesia rentan atau tidak luput dari ancaman siber. Oleh sebab itu, untuk merespons ancaman tersebut, pemerintah Indonesia kemudian membentuk Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) sebagai institusi siber nasional yang berfungsi menjaga keamanan dan kedaulatan siber. Penulis menggunakan pendekatan kualitatif untuk menginterpretasikan konsep, definisi, karakteristik, metafora, simbol, dan deskripsi dari suatu hal melalui studi pustaka. Tulisan ini akan memaparkan lebih jauh mengenai peran BSSN dalam tata kelola keamanan siber di Indonesia sekaligus dalam pelaksanaan diplomasi siber Indonesia baik yang dilakukan melalui kerjasama bilateral maupun multilateral.

Artikel ketiga ditulis bersama oleh Samti Wira Wibawati, Marina Ika Sari, Yuli Ari Sulistyani dengan judul “Dinamika di Luar Upaya Melawan Terorisme di Indo-Pasifik”. Indo-Pasifik adalah ide konseptual yang bertujuan untuk meningkatkan konektivitas ekonomi dan keamanan di antara negara-negara yang berada di kawasan Indo-Pasifik. Sejalan dengan banyaknya kepentingan berbagai negara di Indo Pasifik, masalah keamanan seperti terorisme perlu menjadi perhatian bersama. Berbagai mekanisme kerjasama keamanan telah dibentuk untuk menangani masalah laten ini. Namun, mekanisme kerjasama keamanan yang ada belum mampu mengurangi angka tindak terorisme di kawasan. Studi ini membahas tentang urgensi masalah terorisme di kawasan Indo-Pasifik dengan mekanisme kerjasama keamanan yang sudah ada. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif di mana para peneliti dapat menggambarkan dan mengeksplorasi fenomena yang

diteliti. Dengan menggunakan teori kerjasama internasional, penelitian ini menemukan bahwa perlu untuk mengkalibrasi ulang kerjasama keamanan yang sudah ada atau fokus pada pembuatan mekanisme baru dan terintegrasi di kawasan Indo-Pasifik.

Artikel keempat ditulis oleh Joko Riskiyono dengan judul “Kedaulatan Partisipasi Pemilih dalam Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Umum Serentak 2019”. Penulis menjelaskan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum serentak merupakan momentum kedaulatan rakyat melalui pendidikan politik secara demokratis yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, dan rahasia. Untuk itu diperlukan penguatan dalam pelibatan partisipasi masyarakat selaku pemangku kepentingan dan pemegang kedaulatan, dengan menempatkan pemilih sebagai subyek yang berkuasa mengawasi dan mengontrol calon anggota legislatif dan calon pimpinan eksekutif. Penulis mempertanyakan argumentasi pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum telah menjadikan rakyat berdaulat sebagai sarana pendidikan politik berdemokrasi dengan melihat pelibatan partisipasi masyarakat selaku pemangku kepentingan dalam mengawasi pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum serentak. Penulis berkeyakinan partisipasi dan pengawasan masyarakat tidak sekedar pelengkap kontestasi, namun harus dapat berkontribusi menjadikan pemilihan umum dilaksanakan secara jujur dan adil serta terpercaya.

Artikel kelima berjudul “Kegagalan Gerakan Buruh dan Partai Buruh Pada Pemilu Era Reformasi” ditulis oleh Dodi Faedlulloh. Artikel ini membahas tentang gerakan buruh dengan agenda membangun partai dan memperjuangkan aspirasi-aspirasi mereka yang selama ini tidak terakomodasi. Strategi gerakan buruh dalam membangun partai politik adalah membangun konstituen yang kuat dengan cara melaksanakan penyerapan aspirasi dari bawah, mengidentifikasi masalah, dan memberikan tawaran solusi sebagai bentuk dari pendidikan politik bagi rakyat dan buruh. Selain itu, untuk mengurangi fragmentasi antar lintas organisasi, gerakan buruh perlu melakukan konsolidasi dengan duduk bersama bermusyawarah merumuskan tujuan pembangunan partai buruh secara deliberatif. Hal yang tidak kalah penting dalam agenda membangun partai buruh ini yaitu pentingnya penyelenggaraan pemilu yang tidak mempersulit gerak partai-partai alternatif. Oleh karenanya, segala aturan administratif yang memberatkan dalam regulasi pembentukan partai politik saat ini perlu direvisi untuk meningkatkan kualitas demokratisasi dan demokrasi yang lebih baik di Indonesia.

Artikel keenam atau terakhir dalam edisi ini ditulis oleh Anggalih Bayu Muh. Kamim dengan judul “Peran Organisasi Masyarakat Sipil dalam Proses Perintisan Sistem Informasi Desa di Kalibening, Dukun, Magelang, Jawa Tengah”. Tulisan ini merupakan hasil KKN PPM UGM di Desa Kalibening selama 50 hari. Penulis melihat Balai Sakinah ‘Aisiyah (BSA) sebagai organisasi masyarakat sipil yang memiliki peranan penting sebagai mitra pembangunan karena mampu mendorong inovasi perintisan sistem informasi desa. Penelitian dengan metode penelitian partisipatif ini menunjukkan bahwa model bantuan teknis yang didorong BSA dalam perintisan sistem informasi desa memang membantu proses inovasi desa. Namun memunculkan paradoks karena perannya yang dominan dibandingkan peran warga. Dominasi peran organisasi masyarakat sipil mengakibatkan kesenjangan pengetahuan sehingga warga semata menjadi objek. Penelitian ini merekomendasikan untuk melibatkan kelompok sasaran lain seperti kelompok tani, PKK, dan lain-lain dalam pemanfaatan sistem informasi desa.

Ucapan terima kasih secara khusus kami sampaikan kepada para mitra bestari dan dewan redaksi yang telah memberikan masukan untuk semua artikel yang masuk dalam penerbitan Jurnal *Politica* Vol. 10 No. 2 November 2019. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada seksi

editor yang telah membantu terbitnya edisi ini. Kami berharap terbitnya Jurnal Politica Vol. 10 No. 2 November 2019 dapat membantu memberikan informasi yang berguna bagi kegiatan diskusi maupun penelitian mengenai isu-isu bidang politik dalam negeri dan hubungan internasional.

Selamat membaca.

Jakarta, November 2019

Redaksi

Kata Kunci bersumber dari artikel
Lembar ini boleh dikopi tanpa izin dan biaya

Aditya Dwindia Pratama

Post Truth in Indonesia-European Union Dispute Over Palm Oil Issue

The dispute between the European Union (EU) and Indonesia over palm oil issue was triggered by the EU boycott of palm oil commodities. Indonesia as the largest producer of palm oil certainly feels disadvantaged by the EU's stance because it lost the market. The EU boycotted oil palm because it was not in line with its commitments on Sustainable Development Goals (SDGs) which focus on the environment. Palm oil is considered as a commodity that causes a lot of environmental damages. Indonesia challenged the EU at the World Trade Center (WTO) due to EU's discrimination against the trade of palm oil in the European market. Indonesia also questioned EU's commitment to the SDGs with regard to poverty eradication, which Indonesia was working on. The dispute between the two parties in their defense has left questions about the truth behind their standpoints. As the world embarks into the age of post-truth, critical thinking is required to analyze the truth of an issue. This paper is made to question the truth of the defense carried out by the EU and Indonesia so that people are able to take a stand on what they believe is true. The truth is too often determined by the most massive information reported by the media, so to analyze the issues in this paper the author uses literacy observation method, especially through observations of the news in the media related to this issue. To analyze the real truth about the dispute between Indonesia and the EU on the issue of palm oil, it is necessary to understand the post truth theory, trade-off theory and national theory so as to analyze all the interests behind EU and Indonesian policies. Being critical by exploring the reality behind a truth that has been constructed by the media that distributes information is an absolute necessity for every individual in the post truth era.

Keywords: Environment; Trade; Palm Oil; Post Truth; Foreign Policy.

Aditya Dwindia Pratama

Post Truth dalam Perseteruan Indonesia-Uni Eropa Mengenai Isu Kelapa Sawit

Perseteruan antara Uni Eropa (UE) dan Indonesia tentang kelapa sawit dipicu oleh pemboikotan UE terhadap komoditas kelapa sawit. Indonesia sebagai produsen terbesar kelapa sawit tentu merasa dirugikan oleh sikap UE tersebut karena kehilangan pasar. UE memboikot kelapa sawit karena tidak sesuai dengan komitmen UE dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang berfokus pada lingkungan. Kelapa sawit dinilai sebagai komoditas yang menimbulkan banyak kerusakan lingkungan. Indonesia menggugat perlakuan UE ke *World Trade Centre* (WTO) akibat diskriminasi UE terhadap kelapa sawit di pasar Eropa. Indonesia juga mempertanyakan komitmen UE terhadap SDGs yang seharusnya memperhatikan juga poin pemberantasan kemiskinan yang sedang diusahakan Indonesia. Perseteruan antara keduanya dengan pembelaan masing-masing menyisakan pertanyaan tentang kebenaran yang mereka bawa. Dunia yang masuk di era *post truth* memerlukan pemikiran yang kritis untuk menganalisa kebenaran akan suatu isu. Tulisan ini dibuat untuk mempertanyakan kembali kebenaran dari pembelaan yang dilakukan UE dan Indonesia sehingga masyarakat mampu menempati posisi yang benar-benar mereka inginkan. Kebenaran telah terlalu sering ditentukan oleh informasi yang paling masif diberitakan oleh media, sehingga untuk menganalisa isu pada tulisan ini penulis menggunakan pengamatan literasi, terutama mengamati berita-berita yang media distribusikan terkait isu ini. Untuk menganalisa kebenaran sesungguhnya tentang perseteruan Indonesia dan UE pada isu kelapa sawit perlu untuk memahami *post truth theory*, *trade off theory*, dan *national theory* sehingga mampu menganalisa segala kepentingan dibalik kebijakan UE dan Indonesia. Bersikap kritis dengan menggali kenyataan dibalik sebuah kebenaran yang telah terkontruksi oleh media yang mendistribusikan informasi adalah sebuah hal yang mutlak untuk dilakukan oleh setiap individu di era *post truth*.

Kata Kunci: Lingkungan; Perdagangan; Kelapa Sawit; *Post Truth*; Politik Luar Negeri.

Kata Kunci bersumber dari artikel
Lembar ini boleh dikopi tanpa izin dan biaya

Hidayat Chusnul Chotimah

Cyber Security Governance and Indonesian Cyber Diplomacy by National Cyber and Encryption Agency

The virtual world is one territory that is now taken into account in a national security state, in addition to land, sea and air territories. As one of the largest internet user countries in the world, Indonesia is vulnerable to cyber threats. In response to the said threat, the Indonesian government established the National Cyber and Encryption Agency (BSSN) as a national cyber institution mandated with the responsibility to maintain cyber security and sovereignty. This paper uses a qualitative approach to interpret concepts, definitions, characteristics, metaphors, symbols, and descriptions of things through library research. It elaborates further on the role of BSSN in the management of cyber security in Indonesia as well as in the implementation of Indonesian cyber diplomacy both through bilateral and multilateral cooperation.

Keywords: Cyber Security; Cyber Diplomacy; Institutional; BSSN; Indonesia.

Hidayat Chusnul Chotimah

Tata Kelola Keamanan Siber dan Diplomasi Siber Indonesia di Bawah Kelembagaan Badan Siber dan Sandi Negara

Dunia maya merupakan salah satu aspek yang saat ini ikut diperhitungkan dalam sebuah keamanan nasional suatu negara, di samping ranah darat, laut dan udara. Sebagai salah satu negara pengguna internet terbesar di dunia, telah menjadikan Indonesia rentan atau tidak luput dari ancaman siber. Oleh sebab itu, untuk merespon ancaman tersebut, pemerintah Indonesia kemudian membentuk Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) sebagai institusi siber nasional yang berfungsi menjaga keamanan dan kedaulatan siber. Pendekatan yang digunakan dalam tulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menginterpretasikan konsep, definisi, karakteristik, metafora, simbol, dan deskripsi dari suatu hal melalui studi pustaka. Tulisan ini akan memaparkan lebih jauh mengenai peran BSSN dalam tata kelola keamanan siber di Indonesia sekaligus dalam pelaksanaan diplomasi siber Indonesia baik yang dilakukan melalui kerjasama bilateral maupun multilateral.

Kata Kunci: Keamanan Siber; Diplomasi Siber; Kelembagaan; BSSN; Indonesia.

Kata Kunci bersumber dari artikel
Lembar ini boleh dikopi tanpa izin dan biaya

Samti Wira Wibawati, Marina Ika Sari, Yuli Ari Sulistyani

The Dynamics Beyond Counter Terrorism Measures in the Indo-Pacific

The Indo-Pacific is a conceptual idea aimed at enhancing economic connectivity and security among states in the Indo-Pacific region. In line with the high interest from many Indo-Pacific states, security problems like terrorism are of common concerns that need to be addressed. Various existing security cooperation mechanisms have been established to solve this latent problem. However, these mechanisms have not been able to decrease the number of terrorist acts in the region. This study discusses the urgency of terrorism issues in the Indo-Pacific region with the current security cooperation mechanisms. This research uses qualitative method which allows the researchers to describe and explore the observed phenomenon. Using the theory of international cooperation, this research found that it is necessary to recalibrate the existing security cooperation or to focus on making a new and integrated mechanism in the Indo-Pacific region.

Keywords: Terrorism; International Cooperation; Indo-Pacific; Security.

Samti Wira Wibawati, Marina Ika Sari, Yuli Ari Sulistyani

Dinamika di Luar Upaya Melawan Terorisme di Indo-Pasifik

Indo-Pasifik adalah ide konseptual yang bertujuan untuk meningkatkan konektivitas ekonomi dan keamanan di antara negara-negara yang berada di kawasan Indo-Pasifik. Sejalan dengan banyaknya kepentingan berbagai negara di Indo Pasifik, masalah keamanan seperti terorisme perlu menjadi perhatian bersama. Berbagai mekanisme kerjasama keamanan telah dibentuk untuk menangani masalah laten ini. Namun, mekanisme kerjasama keamanan yang ada belum mampu mengurangi angka tindak terorisme di kawasan. Studi ini membahas tentang urgensi masalah terorisme di kawasan Indo-Pasifik dengan mekanisme kerjasama keamanan yang sudah ada. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dimana para peneliti dapat menggambarkan dan mengeksplorasi fenomena yang diteliti. Dengan menggunakan teori kerjasama internasional, penelitian ini menemukan bahwa perlu untuk mengkalibrasi ulang kerjasama keamanan yang sudah ada atau fokus pada pembuatan mekanisme baru dan terintegrasi di kawasan Indo-Pasifik.

Kata Kunci: Terorisme; Kerjasama Internasional; Indo-Pasifik; Keamanan.

Kata Kunci bersumber dari artikel
Lembar ini boleh dikopi tanpa izin dan biaya

Joko Riskiyono

Voters' Agency in the Supervision of Regional Elections and the 2019 Simultaneous General Elections

The implementation of regional elections and simultaneous general elections marks the momentum of voters' agency through democratic political education carried out in a direct, public, free and confidential manner. For this reason, public participation needs to be strengthened as stakeholders and agents of the general elections in charge of monitoring and overseeing legislative candidates and executive leadership candidates. The study was conducted to see whether the implementation of regional elections and simultaneous general elections has resulted in the promotion of voters' agency through education in politics and democracy and public participation as stakeholders of general elections in overseeing regional elections and simultaneous general elections. Thus, the public will play a bigger role than merely complementary agents - through participation and oversight - in the festival of democracy. They will be enabled to contribute to successful organization of honest, fair and reliable general elections.

Keywords: Agency; Participation; Voters; Supervision; Election.

Joko Riskiyono

Kedaulatan Partisipasi Pemilih dalam Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Umum Serentak 2019

Menghadapi penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum serentak merupakan momentum kedaulatan rakyat melalui pendidikan politik secara demokratis yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, dan rahasia. Untuk itu diperlukan penguatan dalam pelibatan partisipasi masyarakat selaku pemangku kepentingan dan pemegang kedaulatan, dengan menempatkan pemilih sebagai subyek yang berkuasa mengawasi dan mengontrol calon anggota legislatif dan calon pimpinan eksekutif. Apakah dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum telah menjadikan rakyat berdaulat sebagai sarana pendidikan politik berdemokrasi dan bagaimana pelibatan partisipasi masyarakat selaku pemangku kepentingan dalam mengawasi pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum serentak. Sehingga partisipasi dan pengawasan masyarakat tidak sekedar pelengkap kontestasi, namun dapat berkontribusi menjadikan pemilihan umum dilaksanakan secara jujur dan adil serta terpercaya.

Kata Kunci: Kedaulatan; Partisipasi; Pemilih; Pengawasan; Pemilu.

Kata Kunci bersumber dari artikel
Lembar ini boleh dikopi tanpa izin dan biaya

Dodi Faedlulloh

The Failure of the Labor Movement and Labor Party in the Reform Era General Elections

This article explains about the labor movement as an agenda of its organization (labor party) to pursue labor's aspirations which have been rarely accommodated by government. A possible strategy that can be devised by the labor movement to establish a political party is by developing a strong constituency. This can be achieved by accommodating discussions on important issues from the grassroots level to identify problems and solutions as a form of political education for both labors and the public in general. Moreover, the labor movement needs to promote coordination and avoid inter-organizational disharmony and division. All labor practitioners shall work together and share ideas to shape a committed vision towards establishment of the labor party. Another vital part of this agenda lies in the importance of the implementation of general elections that facilitates the movement of alternative parties. Therefore, current formal administrative rules that hinder the registration of new political parties need to be urgently revised to promote better democracy in Indonesia.

Keywords: Labor; Labor Party; Election.

Dodi Faedlulloh

Kegagalan Gerakan Buruh dan Partai Buruh Pada Pemilu Era Reformasi

Artikel ini membahas tentang gerakan buruh dalam agenda membangun partainya sendiri untuk memperjuangkan aspirasi-aspirasi buruh yang selama ini tidak diakomodasi. Strategi yang bisa dilakukan oleh gerakan buruh untuk membuka kemungkinan membentuk partai politik yaitu dengan membangun konstituen yang kuat dengan cara melaksanakan penyerapan aspirasi dari bawah dalam mengidentifikasi masalah beserta tawaran solusi sebagai bentuk dari pendidikan politik bagi rakyat dan buruh. Selain itu, untuk mengurangi fragmentasi antar lintas organisasi, gerakan buruh juga harus segera melakukan konsolidasi. Seluruh aktivis buruh duduk bersama dan bermusyawarah merumuskan tujuan pembangunan partai buruh secara deliberatif. Hal yang tidak kalah penting dalam agenda membangun partai buruh ini yaitu pentingnya penyelenggaraan pemilu yang tidak mempersulit gerak partai-partai alternatif. Oleh karenanya, segala aturan administratif yang memberatkan dalam regulasi pembentukan partai politik saat ini perlu direvisi untuk meningkatkan kualitas demokratisasi dan demokrasi yang lebih baik di Indonesia.

Kata Kunci: Buruh; Partai Buruh; Pemilu.

Kata Kunci bersumber dari artikel
Lembar ini boleh dikopi tanpa izin dan biaya

Anggalih Bayu Muh. Kamim

The Role of Civil Society Organizations in Pioneering Village Information System in Kalibening, Dukun, Magelang, Central Java

Balai Sakinah 'Aisyiyah community group has an important role as the development partner of the Kalibening Village, Dukun District, Magelang Regency. The MAMPU financial assistance scheme has encouraged BSA to drive innovation in pioneering the village information system (SID) in Kalibening. The pioneering of the said village information system was carried out in collaboration with students, the village government and some residents. An assessment of the village information system development process in Kalibening must be carried out to evaluate the overly dominant role of technical assistance in village development. This research was conducted with a participatory research method to allow researchers be a part of the studied phenomenon to explore the paradoxes that emerged from implementing the Balai Sakinah Aisyiyah's technical assistance in pioneering the village information system in Kalibening, Dukun, Magelang. The data collection and analysis were carried out throughout the development of the village information system during the Gadjah Mada University community engagement program in Kalibening Village for a period of 50 days. The results of the study show that the model of technical assistance advocated by BSA in pioneering SID does indeed help the village innovation process. However, paradoxes arise in the disproportionately bigger role that civil society organizations played compared to that of the villagers. Civil society organizations designed the SID development method without prior consultations with the villagers. The dominance of the civil society organizations also resulted in knowledge gaps among villagers. They become nothing more than merely an object for data collection. Nevertheless, the students involved in the community engagement program facilitated the villagers to utilize the resulting data.

Keywords: Technical Assistance; Civil Society Organization; the Village Information System.

Anggalih Bayu Muh. Kamim

Peran Organisasi Masyarakat Sipil dalam Proses Perintisan Sistem Informasi Desa di Kalibening, Dukun, Magelang, Jawa Tengah

Balai Sakinah 'Aisyiyah memiliki peranan penting sebagai mitra pembangunan desa Kalibening, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang. Bantuan skema donor MAMPU mendorong keterlibatan BSA dalam mendorong inovasi perintisan sistem informasi desa di Kalibening. Perintisan sistem informasi desa dilakukan bersama dengan para mahasiswa, pemerintah desa dan sebagian warga. Pengkajian terhadap proses perintisan sistem informasi desa di Kalibening perlu didalami untuk mengevaluasi terlalu dominannya peran bantuan teknis dalam pembangunan desa. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian partisipatif untuk menjadikan peneliti menjadi bagian dari fenomena yang dikaji untuk menggali paradoks yang muncul dari pelaksanaan bantuan teknis Balai Sakinah 'Aisyiyah dalam perintisan sistem informasi desa di Kalibening, Dukun, Magelang. Pengumpulan dan analisis data dilakukan sepanjang pelaksanaan program perintisan sistem informasi di desa selama pelaksanaan KKN PPM UGM di Desa Kalibening selama 50 hari. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model bantuan teknis yang didorong BSA dalam perintisan SID memang membantu proses inovasi desa. Akan tetapi, muncul berbagai paradoks dalam peran organisasi masyarakat sipil yang terlalu banyak dibandingkan peran warga. Organisasi masyarakat sipil menentukan sendiri metode yang dipakai dalam perintisan SID tanpa terlebih dahulu melibatkan warga lain. Dominasi peran organisasi masyarakat sipil juga membawa masalah kesenjangan pengetahuan dengan warga. Warga semata menjadi objek yang kemudian coba dimediasi oleh mahasiswa KKN untuk dapat memanfaatkan data. Penelitian ini merekomendasikan kepada para pemangku kepentingan di Kalibening untuk melibatkan kelompok sasaran lain seperti kelompok tani, PKK, dan lain-lain dalam pemanfaatan sistem informasi desa.

Kata Kunci: Bantuan Teknis; Organisasi Masyarakat Sipil; Sistem Informasi Desa.